



## **Implementasi Program Bhabinkamtibmas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Binaan pada Wilayah Kerja Kepolisian Sektor (Polsek) Lasolo Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
<p>Ulvab Hardianto Universitas Sulawesi Tenggara <a href="mailto:ulianto9393@gmail.com">ulianto9393@gmail.com</a></p> <p>Haeruddin Universitas Sulawesi Tenggara <a href="mailto:haersituru@gmail.com">haersituru@gmail.com</a></p> <p>La Ode Bariun Universitas Sulawesi Tenggara <a href="mailto:direkturbariun@gmail.com">direkturbariun@gmail.com</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Hardianto, U., Haeruddin., & Bariun, L. O. (2025). Implementasi Program Bhabinkamtibmas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Binaan pada Wilayah Kerja Kepolisian Sektor (Polsek) Lasolo Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3417-3430.

### **Abstrak**

Implementasi Program Bhabinkamtibmas dengan Pendekatan Pemecahan Masalah: Peran Strategis dalam Mendukung Tata Kelola Desa Binaan. Implementasi program Bhabinkamtibmas (Polisi Masyarakat) dengan pendekatan pemecahan masalah berperan strategis dalam mendukung tata kelola desa binaan. Sinergi antara petugas Bhabinkamtibmas dan perangkat desa berkontribusi pada pencegahan konflik, penyelesaian masalah sosial, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadikannya subjek penelitian menarik dengan judul: "Implementasi Program Bhabinkamtibmas dalam Tata Kelola Desa Binaan di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor (Polsek) Lasolo Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi program Bhabinkamtibmas terdiri dari empat indikator: 1) Indikator Komunikasi; 2) Indikator Sumber Daya; 3) Indikator Disposisi (Sikap Pelaksana); dan 4) Indikator Struktur Birokrasi. Keempat indikator telah terlaksana dengan baik, meskipun diakui belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari: Faktor Internal (Kepolisian Sektor & Bhabinkamtibmas), meliputi: 1) Aspek Komunikasi; 2) Aspek Sumber Daya; 3) Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana); 4) Aspek Struktur Birokrasi; Faktor Eksternal (Desa & Masyarakat), meliputi: 1) Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya; 2) Dukungan Pemerintah Desa; 3) Kebijakan Daerah. Faktor-faktor ini terbukti memengaruhi pelaksanaan program Bhabinkamtibmas. Oleh karena itu, pelaksanaan program Bhabinkamtibmas—termasuk indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap Pelaksana), dan Struktur Birokrasi, serta faktor internal (Kepolisian Sektor & Bhabinkamtibmas) dan faktor eksternal (Desa & Masyarakat)—perlu tetap menjadi fokus khusus bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program Bhabinkamtibmas.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Program, Bhabinkamtibmas, Tata Kelola Desa

### Abstract

Implementation of the Bhabinkamtibmas Program Using a Problem-Solving Approach: A Strategic Role in Supporting the Governance of Assisted Villages. The implementation of the Bhabinkamtibmas (Community Police Officers) program using a problem-solving approach plays a strategic role in supporting the governance of assisted villages. The synergy between Bhabinkamtibmas officers and village officials contributes to conflict prevention, resolution of social issues, increased legal awareness, and strengthened community participation. This makes it an interesting subject of study entitled: "Implementation of the Bhabinkamtibmas Program in the Governance of Assisted Villages within the Working Area of Lasolo Sector Police (Polsek) of North Konawe Resort Police (Polres)". This research employed a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using an interactive model. The findings show that: The implementation of the Bhabinkamtibmas program consists of four indicators: 1) Communication Indicator; 2) Resource Indicator; 3) Disposition (Implementers' Attitude) Indicator; and 4) Bureaucratic Structure Indicator. All four indicators have been implemented well, although it is acknowledged that not all of them are fully effective in resolving community problems. The influencing factors consist of: Internal Factors (Sector Police & Bhabinkamtibmas), including: 1) Communication Aspect; 2) Resource Aspect; 3) Disposition (Implementers' Attitude) Aspect; 4) Bureaucratic Structure Aspect; External Factors (Village & Community), including: 1) Socioeconomic and Cultural Conditions; 2) Support from Village Government; 3) Local Policies. These have been proven to influence the implementation of the Bhabinkamtibmas program. Accordingly, the implementation of the Bhabinkamtibmas program—including the indicators of Communication, Resources, Disposition (Implementers' Attitude), and Bureaucratic Structure, as well as the internal factors (Sector Police & Bhabinkamtibmas) and external factors (Village & Community)—needs to remain a particular focus for all stakeholders involved in the implementation of the Bhabinkamtibmas program.

**Keywords:** Program Implementation, Bhabinkamtibmas, Village Governance

### A. Pendahuluan

Polri sebagai salah satu instrumen negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki strategi melalui penguatan fungsi kepolisian masyarakat (Polmas) melalui Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Salah satu implementasinya adalah penempatan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di setiap desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas bertugas sebagai ujung tombak Polri dalam membangun komunikasi, melakukan pembinaan, memberikan penyuluhan hukum, serta memfasilitasi penyelesaian masalah sosial yang muncul di masyarakat.

Keberadaan Bhabinkamtibmas di Desa binaan diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam aspek pencegahan konflik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan mitra strategis pemerintah desa. Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan salah satu syarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, khususnya di tingkat desa. Kehadiran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi ujung tombak Polri dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat, memberikan edukasi hukum, serta menjadi mitra Pemerintah Desa dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan syarat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Polri bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, peng-ayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih jauh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus urusan pemerin-tahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masya-rakat, hak asal-usul, dan adat istiadat.

Secara normatif (das Sollen), kehadiran Bhabinkamtibmas (Bhayang-kara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) diproyeksikan sebagai instrumen Polri yang melekat di setiap Desa/Kelurahan untuk melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, mediasi, dan pencegahan masalah sosial. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas harus berperan sebagai problem solver, mediator, dan fasilitator antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat. Dalam kerangka tersebut,

implementasi program Bhabinkamtibmas dengan pendekatan problem solving idealnya mampu mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan berbasis keamanan preventif.

Namun dalam realitas empiris (das Sein), implementasi program Bhabinkamtibmas masih menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan. Di wilayah kerja Polsek Lasolo, Polres Konawe Utara, permasalahan yang muncul antara lain: 1). Jumlah personel terbatas sehingga satu Bhabinkamtibmas sering kali menangani lebih dari satu desa binaan; 2). Kondisi geografis yang sulit dijangkau, terutama desa-desa yang terpencil, membuat pengawasan dan pembinaan tidak optimal; 3). Sarana dan prasarana kurang memadai, seperti keterbatasan transportasi dan fasilitas komunikasi; 4). Kompleksitas masalah sosial, mulai dari konflik tanah, masalah pernikahan, hingga kriminalitas, yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan preventif.

Dengan demikian, terdapat jarak antara das Sollen (apa yang diamanatkan oleh regulasi dan teori) dan das Sein (apa yang benar-benar terjadi di lapangan). Diskrepansi (perbedaan atau ketidaksesuaian) ini menunjukkan bahwa implementasi program Bhabinkamtibmas dengan pendekatan problem solving belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan normatifnya.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Program Bhabinkamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Binaan Pada Wilayah Kerja Kepolisian Sektor (Polsek) Lasolo Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa binaan pada wilayah kerja Polsek Lasolo, Polres Konawe Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program Bhabinkamtibmas Polsek Lasolo, Polres Konawe Utara?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi program Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa binaan pada wilayah kerja Polsek Lasolo, Polres Konawe Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Bhabinkamtibmas Polsek Lasolo, Polres Konawe Utara.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

##### **1). Model Van Meter dan Van Horn**

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan salah satu teori klasik dalam studi kebijakan publik. Menurut mereka, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: 1). Standar dan tujuan kebijakan: seberapa jelas tujuan kebijakan yang dirumuskan; 2). Sumber daya: ketersediaan sumber daya finansial, manusia, dan material untuk melaksanakan kebijakan; 3). Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana: koordinasi dan interaksi antar aktor implementasi; 4). Karakteristik badan pelaksana: meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan dalam organisasi pelaksana; 5). Kondisi sosial, ekonomi, dan politik: lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi proses implementasi; 6). Disposisi pelaksana: sikap, komitmen, dan pemahaman aktor terhadap kebijakan.

Model ini menekankan hubungan dinamis antara variabel-variabel tersebut. Misalnya, meskipun tujuan kebijakan jelas, implementasi bisa gagal jika sumber daya terbatas atau disposisi pelaksana rendah. Dalam konteks Bhabinkamtibmas, standar kebijakan sudah jelas tertuang dalam regulasi, namun keterbatasan jumlah personel dan sarana transportasi di desa terpencil dapat menjadi penghambat.

##### **2). Teori Edward III**

Edward III (1980) menekankan empat faktor kunci dalam implementasi kebijakan: 1). Komunikasi: Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar pelaksana memahami apa yang harus dilakukan. Distorsi komunikasi dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak sesuai harapan; 2). Sumber daya: Implementasi membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah dan kualitas personel, informasi, wewenang, maupun fasilitas. Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan berhenti pada level normative; 3). Disposisi: Sikap, motivasi, dan komitmen pelaksana kebijakan berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Pelaksana yang berkomitmen

tinggi akan mencari cara kreatif untuk mengatasi keterbatasan, sedangkan yang tidak memiliki komitmen cenderung menjalankan kebijakan secara minimalis; 4). Struktur birokrasi: Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki struktur yang mendukung efektivitas kerja, dengan mekanisme koordinasi dan SOP yang jelas. Birokrasi yang kaku, berbelit, dan hierarkis dapat menghambat implementasi.

Teori Edward III relevan untuk menganalisis implementasi Bhabinkamtibmas karena mencerminkan persoalan di lapangan: apakah komunikasi antara Polres, Polsek, dan aparat desa sudah efektif; apakah sumber daya Bhabinkamtibmas mencukupi; apakah pelaksana memiliki disposisi yang baik; serta apakah struktur birokrasi mendukung koordinasi lintas sektor.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, menunjuk pada 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. 4 (empat) variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Putra & Khaidir, 2019).

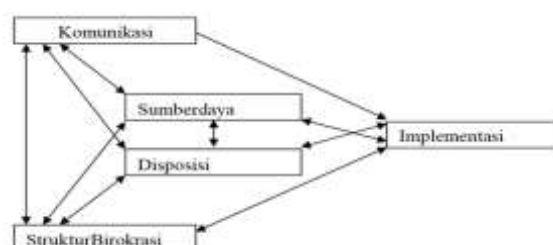
Komunikasi, yaitu menunjuk pada setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. (target groups). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Seandainya kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Disposisi, yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program.

Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam Guideline program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dalam hal ini hanya dapat lahir jika stuktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model dari George C.Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1. Model Implementasi Edward III**

Model implementasi dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program diberbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik. Model implementasi ini menawarkan konsep implementasi yang menekankan pada elemen penting dari implementasi itu sendiri yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur biroktasi. Semua elemen ini ketika diimplementasikan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri melainkan harus secara utuh dijalankan (holistik).

Tentunya dalam situasi di Indonesia model implementasi ini harus mengalami penyesuaian dan perubahan-perubahan. Hal penting yang harus disesuaikan adalah konteks budaya birokrasi Indonesia. Birokrasi di Indonesia selalu mengalami distorsi baik dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Hal ini tercermin dalam setiap perilaku aparat birokrasi ketika menerapkan suatu aturan atau ketika kebijakan ingin diimplementasikan. Oleh karena itu ketika model implementasi Edward III ini ingin diimplementasikan secara utuh, akan mengalami berbagai hambatan. Hambatan utamanya adalah upaya untuk menjalankan secara semua elemen dari model ini.

## 2. Konsep Program Problem Solving

*Problem solving* merupakan strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi Bhabinkamtibmas Polri untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Tujuan dilaksanakan *problem solving* adalah untuk mendamaikan permasalahan terhadap warga yang bermasalah. Definisi dari *problem solving* berasal dari dua kata yaitu "problem" dan "solves". Pengertian dari kata "problem" adalah "*a thing that is difficult to deal with or understand*" yaitu merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami atau dilakukan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai "*a question to be answered or solved*" yaitu berupa suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau penyelesaian. Sedangkan pengertian dari kata "*solve*" adalah "*to findananswerto problem*" yaitu untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Secara terminology, pengertian dari "*problem solving*" adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. (Djamarah, Syaiful Bahri, dan Aswan Zain. 2002: 102).

Pengertian dari "*problem solving* merupakan suatu pendekatan dalam melakukan pengajaran yang meng-hadapkan atau memberikan peserta didik suatu permasalahan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa menegnai cara berfikir yang kritis serta memberikan keterampilan atas suatu permasalahan,serta untuk memperoleh pengetahuankonsep esensial dari materi pembelajaran. (Mulyasa, E., 2004:11)

*Problem solving* adalah pendekatan yang sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis, analitis, dan kreatif. Metode ini fokus pada pemecahan masalah sebagai inti dari proses pembelajaran, dan berikut adalah beberapa langkah penting dalam mengembangkan kemam-puan berfikir melalui metode ini yaitu diantaranya dalam melakukan Identifikasi Masalah; menganalisa Masalah; mengumpulkan Informasi; mengidentifikasi Solusi Alternatif; melakukan evaluasi Solusi; memilih Solusi Terbaik; mengimplementasikan Solusi; mengevaluasi Hasil; mempe-lajari dari Pengalaman; dan melakukan latihan secara berkesinam-bungan. Pendekatan ini juga membantu dalam mengembangkan kemam-puan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks kehidupan.Cara berfikir ilmiah adalah pendekatan berpikir yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk mema-hami dunia, menguji hipotesis, dan mencari solusi untuk masalah.

## 3. Konsep Bhabinkamtibmas

Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu anggota Polri yang ditugaskan di setiap desa/kelurahan untuk melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi masalah sosial. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai penghubung antara Polri dengan masyarakat desa.

Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat untuk menjaga kamtibmas secara mandiri melalui kemitraan polisi dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma **community policing** yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan (Skolnick & Bayley, 1988).

Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Secara garis besar, tugas Bhabinkamtibmas meliputi: 1). Melaksanakan kegiatan sambang dan silaturahmi ke masyarakat; 2). Membina forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM); 3). Menyelesaikan permasalahan sosial melalui mediasi; 4). Memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum; 5). Mengidentifikasi potensi gangguan keamanan; 6). Memberikan perlindungan dan pelayanan cepat terhadap masalah masyarakat.

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari "Bhabinkanya Kamtibmas," yang merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia untuk polisi atau anggota kepolisian yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan. Tugas utama Bhabinkamtibmas adalah memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah desa atau kelurahan tempat mereka bertugas. Dalam konteks pemerintahan desa, Bhabinkamtibmas tidak hanya menjadi aparat keamanan, tetapi juga mitra pemerintah desa dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bhabinkamtibmas merupakan bagian penting dari kepolisian Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepolisian kepada masyarakat setempat. Mereka bekerja secara aktif untuk menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan membangun hubungan yang baik dengan warga sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan keamanan di tingkat desa atau kelurahan.

#### **4. Konsep Desa Binaan**

Istilah "Desa Binaan" merujuk pada sebuah desa atau wilayah yang diberikan perhatian khusus, dukungan, atau bantuan oleh pihak tertentu, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, atau perusahaan. Desa binaan adalah konsep dimana pihak-pihak ini berkolaborasi untuk mengembangkan dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa tersebut. Tujuan utama dari konsep ini adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa tersebut.

Desa binaan jika diakitkan dengan bhabinkamtibmas adalah suatu desa atau kelurahan yang berada dalam wilayah hukum dari polsek. Dimana desa binaan ini membutuhkan perhatian yang lebih dan sebagai prioritas utama dalam pembinaan yang berkelanjutan karena tingkat kerawanan gangguan kamtibmasnya tinggi serta aktivitas Masyarakat dalam penyelenggaraan siskamtibmas swakarsa rendah.

Beberapa karakteristik desa binaan, mencakup:

- 1) Program Pembangunan: Desa binaan sering kali menjadi fokus program pembangunan yang mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan desa lainnya.
- 2) Kemitraan: Desa binaan melibatkan kemitraan antara pihak yang memberikan dukungan (seperti pemerintah atau organisasi non-pemerintah) dan pihak desa itu sendiri. Kemitraan ini berupaya untuk memastikan partisipasi aktif penduduk desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat: Salah satu focus penting dalam desa binaan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini mencakup memberdayakan penduduk desa untuk mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengelola program-program pembangunan.
- 4) Pembangunan Berkelanjutan: Program-program desa binaan sering berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, yang berarti bahwa langkah-langkah yang diambil harus berkelanjutan dan berdampak positif jangka panjang terhadap kondisi desa.
- 5) Monitoring dan Evaluasi: Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk mengukur dampak dan efektivitas program-program pembangunan di desa binaan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
- 6) Dukungan Sumber Daya: Pihak yang terlibat dalam desa binaan biasanya memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya finansial, teknis, atau logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan program-program tersebut.

Konsep desa binaan sering digunakan dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, memajukan pertanian, dan menciptakan peluang ekonomi di daerah pedesaan. Hal ini mendorong kolaborasi yang erat antara pihak yang memberikan dukungan dan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa berwenang mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri, namun tetap dalam kerangka sistem pemerintahan nasional.

Dalam praktiknya, pemerintah desa seringkali menghadapi tantangan berupa konflik sosial, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan aparat. Kehadiran Bhabinkamtibmas diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menciptakan iklim aman dan kondusif, sehingga pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan efektif.

## 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Bhabinkamtib-mas

Teori Implementasi Kebijakan; George C. Edwards III (1980) Menyebutkan empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi program/kebijakan: a). Komunikasi: sejauh mana informasi mengenai kebijakan tersampaikan dengan jelas, konsisten, dan dipahami oleh pelaksana serta sasaran; 2). Sumber Daya: meliputi SDM, sarana-prasarana, anggaran, dan waktu; 3). Disposisi/Sikap: komitmen, motivasi, dan respon aparat pelaksana; 4). Struktur Birokrasi: aturan, mekanisme, SOP, dan koordinasi.

Van Meter & Van Horn (1975) Faktor-faktor implementasi di-pengaruhi oleh:

- 1) Tujuan dan standar kebijakan.
- 2) Sumber daya.
- 3) Hubungan antar organisasi.
- 4) Karakteristik lembaga pelaksana.
- 5) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
- 6) Disposisi implementor.

Grindle (1980) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua aspek: a). Isi Kebijakan (*content of policy*): kejelasan tujuan, manfaat bagi kelompok sasaran, tingkat perubahan yang diinginkan; b). Konteks Implementasi (*context of implementation*): aktor, sumber daya, dukungan politik, serta kondisi sosial-ekonomi.

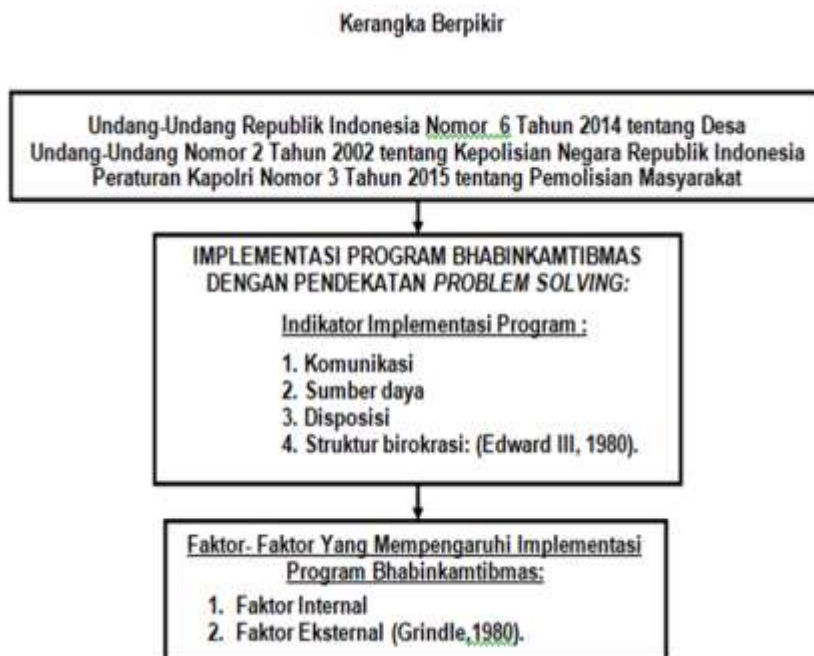
Bhabinkamtibmas adalah personel Polri yang ditugaskan di desa/kelurahan untuk membina masyarakat, mendeteksi dini potensi gangguan Kamtibmas, serta melakukan *problem solving*. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, perannya antara lain:

- 1) Mendukung pemerintah desa dalam menciptakan suasana kondusif.
- 2) Memediasi konflik antar warga.
- 3) Memberikan edukasi hukum dan kesadaran berbangsa.
- 4) Menjadi penghubung antara masyarakat dengan institusi kepolisian.

Dengan mengadopsi teori implementasi dari Grindle (1980), faktor-faktor dapat dibagi ke dalam kategori berikut:

1. Faktor Internal (dari sisi Bhabinkamtibmas dan Polsek Lasolo); a). Komunikasi; Kualitas koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan pemerintah desa; Sosialisasi program kepada masyarakat; b). Sumber Daya; Ketersediaan personel yang memadai; Sarana prasarana (kendaraan dinas, teknologi komunikasi); Dukungan anggaran operasional; c). Disposisi/Sikap; Komitmen dan dedikasi anggota Bhabinkamtibmas. Kompetensi profesional (pengetahuan hukum, keterampilan mediasi); d. Struktur Organisasi & Mekanisme; SOP pelaksanaan tugas. Dukungan dan supervisi dari Polsek Lasolo. Mekanisme koordinasi lintas sektor (desa, kecamatan, instansi lain).
2. Faktor Eksternal (lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya desa binaan); a). Kondisi Sosial-Budaya; Norma adat yang berlaku di masyarakat. Tingkat partisipasi warga dalam kegiatan desa dan keamanan; b). Kondisi Ekonomi; Tingkat kesejahteraan masyarakat (pengangguran, kemiskinan). Potensi konflik akibat sumber daya ekonomi; c. Dukungan Pemerintah Desa; Komitmen kepala desa dan perangkat dalam bersinergi. Dukungan dalam penyediaan fasilitas atau anggaran bersama; d. Lingkungan Politik dan Kebijakan Lokal; Dukungan tokoh masyarakat, adat, dan agama.

Berdasarkan teori di atas, faktor implementasi dapat dipetakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut: Implementasi Program Bhabin-kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dipengaruhi oleh: a). Internal (Polsek & Bhabinkamtibmas) → komunikasi, sumber daya, sikap, struktur organisasi. b). Eksternal (Desa & Masyarakat) → kondisi sosial ekonomi budaya, dukungan pemerintah desa, kebijakan lokal.

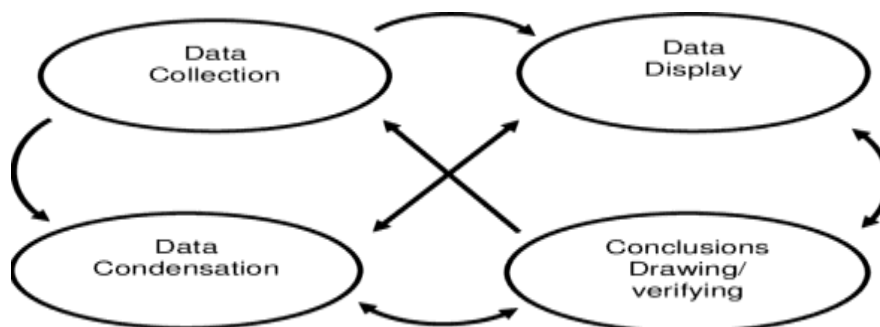


Gambar 2.2. Kerangka Pikir

**Metodologi**

Metode penelitian; adalah deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif.

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif



(Sumber: Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

**C. Hasil Dan Pembahasan Penelitian**

Data temuan melalui implementasi program *problem solving* dalam implementasi program Bhabinkamtibmas Polsek Lasolo pada desa binaan (Desa Morombo Pantai dan Desa Morombo Kepulauan). Tabel berikut ini berisi indikator tahapan *problem solving* (identifikasi masalah, analisis, alternatif solusi, implementasi, dan evaluasi) berikut hasil temuan di lapangan.

Tabel 4.1. : Data Temuan Melalui Pendekatan *Problem Solving* pada Dua Desa Binaan

Tahapan Problem Solving	Desa Morombo Pantai	Desa Morombo Kepulauan
Identifikasi Masalah	Masalah cepat diidentifikasi melalui laporan langsung masyarakat kepada kepala desa atau Bhabinkamtibmas.	Identifikasi masalah cenderung lambat karena harus melewati struktur desa (dusun → sekretaris desa → kepala desa).
Analisis Masalah	Analisis dilakukan bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat secara informal; diskusi	Analisis lebih formal, sering menunggu rapat desa; partisipasi masyarakat terbatas.

<b>Tahapan Problem Solving</b>	<b>Desa Morombo Pantai</b>	<b>Desa Morombo Kepulauan</b>
<b>Alternatif Solusi</b>	cepat dan partisipatif. Alternatif solusi muncul dari musyawarah warga dan aparat desa; Bhabinkamtibmas sering memberi opsi praktis.	Alternatif solusi dibatasi pada prosedur resmi desa; inisiatif Bhabinkamtibmas kadang terhambat aturan.
<b>Implementasi Solusi</b>	Implementasi cepat; Bhabinkamtibmas dapat langsung turun ke lapangan dengan persetujuan kepala desa.	Implementasi sering tertunda karena menunggu disposisi atau surat resmi.
<b>Evaluasi &amp; Umpan Balik</b>	Evaluasi dilakukan secara lisan setelah kasus selesai; masyarakat merasa puas karena masalah cepat terselesaikan.	Evaluasi jarang dilakukan secara terbuka; masyarakat kadang kecewa karena masalah butuh waktu lama terselesaikan.

**Sumber : Kantor Desa Binaan Bhabinkamtibmas Polsek Lasolo, 2025.**

Berdasarkan deskripsi tabel 4.1. tersebut di atas, memperlihatkan adanya perbedaan efektivitas *problem solving* antara Desa Morombo Pantai dan Desa Morombo Kepulauan. Di Morombo Pantai, proses identifikasi hingga implementasi solusi berlangsung lebih cepat karena jalur birokrasi yang ringkas dan adanya fleksibilitas dari pihak Bhabinkamtibmas dalam mengambil keputusan. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih puas, meskipun evaluasi lebih sering dilakukan secara informal.

Sebaliknya, di Morombo Kepulauan, tahapan *problem solving* cenderung berjalan lambat akibat struktur birokrasi yang panjang dan prosedur formal yang harus dilalui. Akibatnya, identifikasi masalah dan implementasi solusi sering tertunda, sementara evaluasi juga kurang terbuka. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya rasa kurang puas di kalangan masyarakat, meski secara formal prosedur birokrasi tetap terjaga.

Dengan demikian, efektivitas *problem solving* lebih tinggi di Morombo Pantai karena birokrasi yang adaptif dan kolaboratif, sedangkan di Morombo Kepulauan masih terhambat oleh birokrasi formal yang kaku.

Analisis *problem solving* yang dilakukan di Desa Morombo Pantai dan Morombo Kepulauan dapat dipahami lebih mendalam dengan menggunakan kerangka faktor implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, dari aspek komunikasi, Morombo Pantai menunjukkan pola komunikasi yang lebih terbuka dan langsung antara masyarakat, aparat desa, dan Bhabinkamtibmas. Informasi tentang masalah segera tersampaikan dan ditindaklanjuti, sehingga mempercepat proses *problem solving*. Sebaliknya, di Morombo Kepulauan komunikasi terhambat oleh birokrasi berjenjang, di mana laporan masyarakat harus melalui beberapa level administratif sebelum sampai ke pengambil keputusan. Kondisi ini memperlambat alur penyelesaian masalah.

Kedua, terkait sumber daya, baik Pantai maupun Kepulauan sama-sama memiliki keterbatasan dalam aspek fasilitas dan personel. Namun, di Morombo Pantai keterbatasan ini dapat diatasi karena adanya dukungan partisipasi masyarakat dan koordinasi yang baik dengan perangkat desa. Sementara di Morombo Kepulauan, keterbatasan sumber daya diperparah oleh prosedur formal yang panjang, sehingga menurunkan efektivitas *problem solving*.

Ketiga, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, Bhabinkamtibmas di Morombo Pantai lebih proaktif dan fleksibel dalam merespons permasalahan warga, termasuk mengambil inisiatif langsung di lapangan dengan dukungan kepala desa. Sikap ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Sebaliknya, di Morombo Kepulauan disposisi Bhabinkamtibmas sering terbentur aturan formal, sehingga inisiatif yang seharusnya bisa mempercepat penyelesaian masalah justru menjadi terbatas.

Keempat, pada aspek struktur birokrasi, Morombo Pantai menam-pilkan struktur yang lebih sederhana dan adaptif, sehingga memudahkan implementasi program *problem solving*. Birokrasi yang ringkas meminimalisir hambatan administratif. Sebaliknya, struktur birokrasi di Morombo Kepulauan masih bersifat hierarkis dan panjang sesuai model Weberian, yang meski memberi kepastian hukum, tetapi mengurangi kecepatan respon terhadap masalah warga.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan problem solving di Morombo Pantai lebih tinggi karena faktor komunikasi yang lancar, disposisi aparat yang proaktif, serta struktur birokrasi yang adaptif. Sedangkan di Morombo Kepulauan, hambatan komunikasi dan struktur birokrasi yang kaku menjadi faktor utama yang menurunkan efektivitas implementasi program. Hal ini sejalan dengan teori Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keseimbangan keempat faktor tersebut, dan kegagalan salah satunya dapat melemahkan hasil implementasi secara keseluruhan.

**Tabel 4.2. : Sintesis Teori Edward III vs Temuan Lapangan**

<b>Faktor Implementasi (Edward III)</b>	<b>Konsep Teori</b>	<b>Temuan Desa Morombo Pantai</b>	<b>Temuan Desa Morombo Kepulauan</b>
<b>Komunikasi</b>	Informasi harus jelas, konsisten, dan tersampaikan kepada pelaksana	Komunikasi langsung dan terbuka; laporan masyarakat cepat diterima oleh kepala desa dan Bhabinkamtibmas	Komunikasi berjenjang; laporan masyarakat lambat sampai karena harus melalui sekretaris desa
<b>Sumber Daya</b>	Keberhasilan implementasi dipengaruhi kecukupan sumber daya (personel, dana, fasilitas)	Sumber daya terbatas, tetapi diatasi dengan dukungan partisipasi masyarakat dan koordinasi informal	Sumber daya terbatas dan diperparah oleh prosedur formal yang panjang, sehingga efektivitas menurun
<b>Disposisi (Sikap Pelaksana)</b>	Keberhasilan ditentukan oleh komitmen, motivasi, dan sikap aparat pelaksana	Bhabinkamtibmas proaktif, fleksibel, sering mengambil inisiatif problem solving dengan dukungan kepala desa	Bhabinkamtibmas sering terhambat oleh aturan formal; inisiatif terbatas, meski ada niat membantu cepat
<b>Struktur Birokrasi</b>	Struktur harus mendukung koordinasi; birokrasi yang terlalu panjang dapat menghambat	Struktur ringkas dan adaptif; masalah cepat ditangani, meski kadang administrasi menyusul	Struktur hierarkis dan panjang (Weberian); memberi kepastian hukum, tetapi membuat respon lambat

**Sumber: Data hasil Olahan Peneliti, 2025**

Tabel 4.2. tersebut di atas, memperlihatkan bahwa keberhasilan *problem solving* di Desa Morombo Pantai lebih kuat didukung oleh komunikasi yang efektif, disposisi aparat yang proaktif, serta struktur birokrasi yang adaptif, meski dengan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, Desas Morombo Kepulauan masih menghadapi hambatan pada hampir semua faktor, terutama komunikasi dan struktur birokrasi yang kaku.

**Tabel 4.3. : Sintesis Teori Edward III vs Temuan Lapangan dan Implikasi Praktis**

<b>Faktor Implementasi (Edward III)</b>	<b>Konsep Teori</b>	<b>Temuan Desa Morombo Pantai</b>	<b>Temuan Desa Morombo Kepulauan</b>	<b>Implikasi Praktis</b>
<b>Komunikasi</b>	Informasi harus jelas, konsisten, dan tersampaikan kepada pelaksana	Komunikasi langsung dan terbuka; laporan cepat diterima oleh kepala desa & Bhabinkamtibmas	Komunikasi berjenjang; laporan lambat sampai karena melewati sekretaris desa	Perlu penyederhanaan alur komunikasi di Kepulauan dengan sistem pelaporan cepat (misalnya WA group resmi desa) agar lebih responsif
<b>Sumber Daya</b>	Keberhasilan implementasi dipengaruhi kecukupan sumber daya (personel,	Sumber daya terbatas, tetapi ditutupi partisipasi masyarakat & koordinasi informal	Sumber daya terbatas dan prosedur panjang membuat efektivitas kurang maksimal	Perlu optimalisasi partisipasi masyarakat & dukungan anggaran desa untuk memperkuat peran

Faktor Implementasi (Edward III)	Konsep Teori	Temuan Desa Morombo Pantai	Temuan Desa Morombo Kepulauan	Implikasi Praktis
<b>Disposisi (Sikap Pelaksana)</b>	dana, fasilitas) Keberhasilan ditentukan oleh komitmen, motivasi, dan sikap aparat pelaksana	Bhabinkamtibmas proaktif, fleksibel, berinisiatif dengan dukungan kepala desa	Bhabinkamtibmas terhambat aturan formal, inisiatif terbatas	Bhabinkamtibmas di kedua desa Penting adanya pelatihan kepemimpinan adaptif bagi aparat desa & Bhabinkamtibmas untuk menyeimbangkan prosedur formal dan kebutuhan lapangan
<b>Struktur Birokrasi</b>	Struktur harus mendukung koordinasi; birokrasi yang terlalu panjang dapat menghambat	Struktur ringkas & adaptif; masalah cepat ditangani meski administrasi menyusul	Struktur hierarkis & panjang; memberi kepastian hukum tapi respon lambat	Perlu reformulasi SOP di Kepulauan agar lebih ringkas tanpa menghilangkan aspek legalitas; bisa diterapkan model koordinasi langsung antara Bhabinkamtibmas dan kepala desa

**Sumber: Data hasil Olahan Peneliti, 2025**

Berdasarkan sintesis antara teori Edward III dan temuan lapangan, terlihat bahwa efektivitas implementasi *problem solving* Bhabinkamtibmas sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di Desa Morombo Pantai, keempat faktor tersebut relatif lebih mendukung karena adanya jalur komunikasi yang sederhana, disposisi aparat yang proaktif, serta struktur birokrasi yang adaptif. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya yang diperparah oleh prosedur formal, serta struktur birokrasi yang hierarkis menjadi kendala utama dalam percepatan *problem solving*.

**D. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian mengenai implementasi program Bhabinkamtibmas dengan pendekatan *problem solving*, dapat disimpulkan, sebagai berikut:
2. Indikator Komunikasi; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai, Komunikasi langsung dan terbuka; laporan cepat diterima oleh kepala desa & Bhabinkamtibmas. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, Komunikasi berjenjang; laporan lambat sampai karena melewati sekretaris des
3. Indikator Sumber Daya; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai, Sumber daya terbatas, tetapi ditutupi partisipasi masyarakat & koordinasi informal. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, Sumber daya terbatas dan prosedur panjang membuat efektivitas kurang maksimal
4. Indikator Disposisi (Sikap Pelaksana); menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai, disposisi (sikap pelaksana); anggota Bhabinkamtibmas proaktif, fleksibel, berinisiatif dengan dukungan kepala desa. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, disposisi (sikap pelaksana); anggota Bhabinkamtibmas terhambat aturan formal, inisiatif terbatas.
5. Indikator Struktur Birokrasi; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai, struktur birokrasi; Struktur ringkas & adaptif; masalah cepat ditangani meski administrasi menyusul. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, struktur birokrasi; Struktur hierarkis & panjang; memberi kepastian hukum tapi respon lambat.
6. Hasil penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Bhabinkamtibmas dengan pendekatan *problem solving*, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- (1). Faktor Internal; (Polsek & Bhabinkamtibmas), meliputi;
  - a. Aspek Komunikasi; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai; Informasi relatif lancar, karena lokasi dekat dengan Polsek Lasolo. Namun tetap ada kendala birokrasi formal. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, lebih sering mengalami keterlambatan komunikasi karena akses transportasi terbatas dan sinyal komunikasi tidak stabil.
  - b. Aspek Sumber Daya; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai; anggota Bhabinkamtibmas bisa lebih sering hadir, meski tetap menangani lebih dari 1 desa. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, kunjungan anggota Bhabinkamtibmas tidak rutin karena keterbatasan personel dan jarak antar pulau.
  - c. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana); menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai; anggota Bhabinkamtibmas aktif hadir di rapat desa, patroli malam, dan kegiatan adat. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, anggota Bhabinkamtibmas tetap berkomitmen, namun kehadiran fisik sering terhambat cuaca laut.
  - d. Aspek Struktur Birokrasi; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai; Koordinasi dengan perangkat desa lebih mudah karena akses darat lancar. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, Struktur formal tetap berjalan, tetapi jarak geografis memperlambat koordinasi langsung.
- (2). Faktor Eksternal (Desa & Masyarakat), meliputi;
  - a. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai; Mayoritas masyarakat petani dan nelayan pesisir. Konflik sering terkait lahan dan hasil pertanian. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, Mayoritas nelayan. Konflik lebih sering terkait wilayah tangkap ikan, hasil laut, dan hutang piutang Dukungan Pemerintah Desa; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai; Pemerintah Desa cukup aktif mendukung anggota Bhabinkamtibmas, misalnya menyediakan balai desa untuk mediasi. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, Dukungan tetap ada, tetapi keterbatasan sarana prasarana (akses transportasi & fasilitas) membuat implementasi kurang maksimal
  - b. Kebijakan Lokal; menunjukkan bahwa di Desa Morombo pantai; Ada Perdes tentang keamanan lingkungan dan gotong royong yang memperkuat peran anggota Bhabinkamtibmas. Sementara di Desa Morombo Kepulauan, kebijakan lokal lebih fokus pada pengaturan hasil laut dan adat istiadat, sehingga pendekatan budaya lebih dominan daripada regulasi formal..

### Saran

- 1). Implementasi program Bhabinkamtibmas dengan pendekatan problem solving terhadap masalah yang dihadapi kedua Desa binaan yaitu Desa Morombo Pantai dan Desa Morombo Kepulauan, berikut ini disarankan, bahwa untuk;
  - a. Indikator Komunikasi; Perlu penyederhanaan alur komunikasi di Kepulauan dengan sistem pelaporan cepat (misalnya WA group resmi desa) agar lebih responsif.
  - b. Indikator Sumber Daya; Perlu optimalisasi partisipasi masyarakat & dukungan anggaran desa untuk memperkuat peran anggota Bhabinkamtibmas di kedua desa.
  - c. Indikator Disposisi (Sikap pelaksana); Penting adanya pelatihan kepemimpinan adaptif bagi aparat desa & anggota Bhabinkamtibmas untuk menyeimbangkan prosedur formal dan kebutuhan lapangan.
  - d. Indikator Struktur Birokrasi; Perlu reformulasi SOP di Kepulauan agar lebih ringkas tanpa menghilangkan aspek legalitas; bisa diterapkan model koordinasi langsung antara anggota Bhabinkamtibmas dan kepala desa.
- 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program Bhabinkamtibmas dengan pendekatan problem solving di Desa Morombo Pantai dan Desa Morombo Kepulauan, berikut ini disarankan, bahwa;
  - a. Faktor Internal ((Polsek & Bhabinkamtibmas); Implementasi program bhabinkamtibmas dengan pendekatan *problem solving* sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi aparat, serta struktur birokrasi yang berlaku di tingkat desa.
  - b. Perbedaan antara Desa Morombo Pantai dan Morombo Kepulauan memperlihatkan bahwa birokrasi yang adaptif dan kolaboratif lebih mampu mendukung problem solving secara cepat dan responsif, sementara birokrasi yang panjang dan kaku cenderung menghambat penyelesaian masalah masyarakat.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan desa dan penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal.

- c. Faktor Eksternal (Desa & Masyarakat), meliputi; a. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya; b. Dukungan Pemerintah Desa; c. Kebijakan Lokal, hendaknya semua *stakeholder* yang terkait, pihak Polsek (anggota Bhabinkamtibmas), perangkat Desa dan masyarakat harus membangun model kebijakan kolaboratif yang dapat menciptakan sinergitas antar *stakeholder* untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan *problem solving* untuk mewujudkan implementasi program Bhabinkamtibmas dan menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik demi untuk menciptakan masyarakat desa yang tertib, aman, nyaman dan damai serta sejahtera.

## E. Referensi

- , 2022. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib, Haedar, dan Antonius Taringan. 2000. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kabupaten Konawe Utara. (2024). Statistik Daerah Kabupaten Konawe Utara 2024. Kendari: BPS Kabupaten Konawe Utara.
- Djamarah, Syaiful Bahri, dan Aswan Zain. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Galtung, J. 1996. *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Oslo: International Peace Research Institute; London: SAGE Publications.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hadi,S. 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, 2024.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Pedoman Bhabinkamtibmas dalam Pelayanan Masyarakat. Jakarta: Kemendagri.
- Korten, David C. 1984. *Strategic Organization for People-Centered Development*. Geneva: UN Non-Governmental Liaison Service.
- Lasswell, Harold D. 1948. *The Structure and Function of Communication in Society*. New York: Institute for Religious and Social Studies.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mintzberg, H. 1983. *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Osborne, D., & Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Profil Desa Morombo Kepulauan, 2024.
- Profil Desa Morombo Pantai, 2024.
- Profil Polsek Lasolo Polres Konawe Utara.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, Fadillah, dan Khaidir. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, Fadillah. 2014. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rahman, A. (2021). Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga kamtibmas desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 115-128.
- Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. 2017. *Organizational Behavior*. 17th Edition. Boston: Pearson.
- Rochman, Abdul. 2009. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Kinerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, B. (2019). Implementasi Bhabinkamtibmas di desa binaan Jawa Timur. *Jurnal Sosial dan Politik*, 6(1), 55-70.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Skolnick, Jerome H., dan David H. Bayley. 1988. *Community Policing: Issues and Practices Around the World*. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice.
- Soetomo. 2008. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, R. (2022). Faktor-faktor keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan desa. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 22-35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wahyudi, T. (2018). Komunikasi efektif Bhabinkamtibmas dengan masyarakat desa. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 4(3), 201-215.
- Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Publik: Suatu Pendekatan Baru*. Jakarta: Rajawali Press.